



**RENJA 2019**  
**BADAN PENGELOLA**  
**KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**TAHUN ANGGARAN 2018**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA SKPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD. Dengan demikian RENJA SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA SKPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 - 2021, Badan pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang diikuti penyusunan sasaran dan kebijakannya, penyusunan program, kegiatan dan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2016-2021. Renstra tersebut dijabarkan dalam Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2019.

Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2019 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan skpd, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penelaahan usulan program.

### **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan pengelola Keuangan Daerah Pesisir Selatan Tahun 2019 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pengelola Keuangan Daerah disusun dengan maksud untuk dijadikan acuan dalam menetapkan dokumen

perencanaan pembangunan yang memuat program dan kegiatan yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan dan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah :

1. Sebagai acuan Badan pengelola Keuangan Daerah dalam rangka untuk terlaksananya RKPD Kabupaten Pesisir Selatan 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Untuk merumuskan rencana program dan kegiatan Badan pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal;
3. Sebagai arah dan acuan penyusunan RKA, DPA, dan LAKIP;
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**BAB I**   Pendahuluan

- 1.1.   Latar Belakang
- 1.2.   Landasan Hukum
- 1.3.   Maksud dan Tujuan
- 1.4.   Sistematika Penulisan

**BAB II**   Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1.   Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2.   Daerah
- 2.3.   Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4.   Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.5.   Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.6.   Penelaahan Usulan Program dan kegiatan Masyarakat

**BAB III**   Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1.   Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2.   Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3.   Program dan Kegiatan

**BAB IV**   Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

**BAB V**   Penutup

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2017

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2017

Pengukuran kinerja dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja kegiatan adalah masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Pengukuran Kinerja Kegiatan didasarkan pada target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran. Adapun target kinerja pada masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
  - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
    - Masukan  
Jumlah dana yang dibutuhkan : Rp 2.991.386.448,-
    - Keluaran  
Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
    - Hasil  
Terpenuhinya Kendaraan Dinas Operasional
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
    - Masukan  
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp 161.661.000,-

- Keluaran  
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja
  - Hasil  
Terbitnya Penyampaian SPJ Fungsional SKPD
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
- Masukan  
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp.74.398.400,-
  - Keluaran  
Tersedianya buku laporan keuangan semesteran
  - Hasil  
Tersedianya informasi keuangan semesteran
- c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Masukan  
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp 97.734.208,-
  - Keluaran  
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun
  - Hasil  
Terpenuhinya Informasi Keuangan Daerah yang Transparansi
3. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- a. Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah
- Masukan  
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp 239.022.530,-
  - Keluaran  
Tersedianya Sertifikat Tanah Milik Pemerintah
  - Hasil

- Terlaksananya kepastian dokumen kepemilikan tanah hak milik penda untuk pembangunan sekolah dan pembangunan bidang lainnya di kabupaten pessel
4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- a. Penanganan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah
- Masukan  
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp 176.530.000,-
  - Keluaran  
Terlaksananya Penanganan Kasus dan penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah
  - Hasil  
Terselesainya Kasus dan Ganti Kerugian Negara atau Daerah
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- a. Penyusunan Standar Satuan Harga
- Masukan  
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp.66.951.752,-
  - Keluaran  
Tersedianya Buku Satuan Harga
  - Hasil  
Tersusunnya Buku Standar Harga
- b. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
- Masukan  
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp.231.697.516,-
  - Keluaran  
Tersusunnya Rancangan Perda APBD

- Hasil  
Terarahnya Pelaksanaan Anggaran
- c. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
  - Masukan  
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp.186.471.366,-
  - Keluaran  
Tersusunnya Dokumen Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
  - Hasil  
Terarahnya Pelaksanaan Anggaran
- d. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
  - Masukan  
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp.166.897.528,-
  - Keluaran  
Tersusunnya Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD
  - Hasil  
Terarahnya Pelaksanaan Anggaran
- e. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
  - Masukan  
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp.160.731.808,-
  - Keluaran  
Tersusunnya Dokumen Rancangan Peraturan Daerah KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
  - Hasil  
Terarahnya Pelaksanaan Anggaran

- f. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Masukan  
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp.105.566.752,-
  - Keluaran  
Tersusunnya Dokumen Rancangan Peraturan KDH  
tentang Penjabaran Perubahan APBD
  - Hasil  
Tersedianya Dokumen Rancangan Peraturan KDH  
tentang Penjabaran Perubahan APBD
- g. Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang  
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- Masukan  
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp.99.797.296,-
  - Keluaran  
Tersusunnya Dokumen Rancangan Peraturan tentang  
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  - Hasil  
Tersedianya Dokumen Rancangan Peraturan tentang  
Penjabaran Pertanggungjawaban APBD
- h. Penyusunan DPA SKPD
- Masukan  
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp.132.636.452,-
  - Keluaran  
Tersusunnya DPA OPD
  - Hasil  
Terarahnya Peanggaran anggaran OPD

- i. Penghapusan Barang-barang Inventaris
  - Masukan  
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp.82.156.338,-
  - Keluaran  
Teralaksananya Proses Penghapusan Barang Inventaris
  - Hasil  
Terselesainya Penghapusan Barang Inventaris
- j. Penyusunan DPA Perubahan SKPD
  - Masukan  
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp.109.432.428,-
  - Keluaran  
Tersusunnya Buku DPA Perubahan OPD
  - Hasil  
Terarahnya Penganggaran anggaran OPD
- k. Penunjang Sistem Pengelola Keuangan Daerah
  - Masukan  
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp.391.791.488,-
  - Keluaran  
Tersedianya Penunjang SKPD
  - Hasil  
Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah dengan perangkat SIPKD
- l. Pengelolaan dan Pemnatausahaan Gaji PNSD
  - Masukan  
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp.110.473.416,-
  - Keluaran

Terpenuhinya Pengembangan dan peningkatan pengelolaan dan Penatausahaan Gaji

- Hasil  
Terlaksananya Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji ASN
- m. Pengelolaan dan Pemnatausahaan Kas Daerah
  - Masukan  
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp.62.402.612,-
  - Keluaran  
Terlaksananya Pengelolaan Penatausahaan Kas Daerah
  - Hasil  
Terwujudnya Pengelolaan Penatausahaan Kas Daerah
- n. Peningkatan Manajemen Aset
  - Masukan  
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp.378.978.360,-
  - Keluaran  
Teraksananya Peningkatan Manajemen Barang Daerah
  - Hasil  
Tersedianya Buku Laporan barang Milik daerah per OPD dan unit milik Daerah
- o. Verifikasi rencana Kebutuhan Barang (RKB) dan pemeliharaan Barang
  - Masukan  
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp.75.713.436
  - Keluaran  
Teraksananya Verifikasi rencana Kebutuhan Barang dan pemeliharaan Barang

- Hasil

Terverifikasinya Rencana Kebutuhan Barang dan pemeliharaan Barang

6. Program Pembinaan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kota

a. Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran 2017

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp.57.205.764,-

- Keluaran

Tersedianya Dokumen Analisa APBD Pesisir Selatan

- Hasil

Tersusunnya Dokumen Analisa APBD Pesisir Selatan

b. Asistensi Penataan Keuangan Daerah

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp.137.367.688,-

- Keluaran

Terlaksananya Penataan Asistensi Keuangan Daerah

- Hasil

Terarahnya Penataan Keuangan Daerah

c. Pengelolaan dana Hibah dan Bantuan Sosial

- Masukan

Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp.168.467.660,-

- Keluaran

Terlaksananya Pengelolaan dana Hibah dan Bantuan Sosial

- Hasil  
Terbitnya Pengelolaan dana Hibah dan Bantuan Sosial
  
- d. Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman APBD tahun Anggaran 2018
  - Masukan  
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp.127.239.028,-
  - Keluaran  
Tersusunnya Buku Pedoman APBD
  - Hasil  
Tersedianya Buku Pedoman Penyusunan APBD
  
- e. Analisa Standar Belanja Kabupaten Pesisir Selatan
  - Masukan  
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp.195.965.008,-
  - Keluaran  
Tersedianya Dokumen Analisa Standar Belanja Kabupaten Pesisir Selatan
  - Hasil  
Terukurnya Standar Belanja untuk pengelolaan Keuangan di Kabupaten Pesisir Selatan
  
- 7. Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa atau Nagari
  - a. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Nagari
    - Masukan  
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp.49.043.232,-
    - Keluaran  
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan Nagari

- Hasil  
Terbitnya Administrasi Pengelolaan Keuangan Nagari
- b. Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer ke Nagari
  - Masukan  
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp.100.938.446,-
  - Keluaran  
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer ke Nagari
  - Hasil  
Terevaluasinya Dana Transfer Dana ke Nagari
- c. TOT Aplikasi Simda Desa
  - Masukan  
Jumlah dana yang dibutuhkan adalah Rp.94.375.056,-
  - Keluaran  
Terlaksananya TOT Aplikasi Desa ( Nagari)
  - Hasil  
Terselenggaranya TOT Aplikasi Siskuedes ( Nagari)

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah**

Sesuai dengan pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah terbentuk pada akhir tahun 2016 maka program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan sampai tahun 2017 secara umum masih melanjutkan beberapa program yang telah dilaksanakan pada Tahun 2016.

Evaluasi terhadap kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran 52,51 %

- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 68,52 %.
- Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 70,24 %.
- Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran 99,27%.
- Kegiatan Penyusunan Standar satuan Harga dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 96,88 %
- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2017 dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran 90,11%.
- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2017 dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 91,65 %
- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan capaian kinerja 100% dengan realisasi 97,55%
- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 98,70 %.
- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 98,03 %.
- Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset atau Barang Daerah dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 98,72 %.

- Kegiatan Penyusunan DPA SKPD dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 96,25 %.
- Kegiatan Penghapusan Barang -barang Inventaris dengan capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 90,40 %.
- Kegiatan Penyusunan DPA Perubahan SKPD dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 94,63%.
- Kegiatan Penunjang Sistem Informasi pengelolaan Keuangan Daerah dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 97,13%
- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang APBD 2016 dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 99,60%
- Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Tahun 2017 dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 96,51%.
- Kegiatan Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 65,54%.
- Asistensi Penataan Keuangan Daerah dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 77,73%.
- Kegiatan Asistensi Penataan Keuangan Daerah dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 77,73%.
- Kegiatan Dana Hibah dan Bantuan Sosial dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 93,85%.
- Kegiatan Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 2017 dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 83,38%.
- Kegiatan Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 2017 dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 83,38%.

- Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Nagari dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 76,04%.
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi dana Transfer ke Nagari dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 85,67%.
- Kegiatan TOT Aplikasi SIMDA DESA dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 21,53%.
- Kegiatan Penanganan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 73,49 %.
- Kegiatan Sertifikasi Tanah Hak Milik Pemerintah Daerah dengan capaian kinerja 100% dan realisasi anggaran 85,32 %

Capaian kinerja keuangan dalam rangka realisasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja pada Badan pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 yaitu dengan alokasi anggaran Rp 10.603.822.966.- dan terealisasi Rp. 9.344.908.495,- atau tingkat penyerapannya yaitu 88,13%, dengan rincian sebagaimana pada Tabel 3. dibawah ini :

**Tabel**  
**Capaian Keuangan Tahun Anggaran 2017**

PROGRAM / KEGIATAN (3)	ANGGARAN (4)	REALISASI (5)	CAPAIAN (%) (6)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.655.672.648	4.655.672.648	88,18
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	4.655.672.648	4.655.672.648	88,18

<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	99.600.000	85.313.657	85,66 %
Pendidikan dan Pelatihan Formal	99.600.000	85.313.657	85,66 %
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	333.793.608	287.657.414	86,18
Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	161.661.000	126.745.453	78,40%
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	74.398.400	64.066.798	86,11%
Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	97.734.208	96.845.163	99,09%
<b>Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah</b>	239.022.530	171.626.515	71,80 %
Sertifikasi Tanah Hak Milik pemerintah Daerah	239.022.530	171.626.515	71,80%
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	15.000.000	14.802.291	98,68 %
Pelaksanaan Festival Langkisau	15.000.000	14.802.291	98,68%
<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	176.530.000	138.861.209	78,66 %
Kegiatan Penanganan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah	176.530.000	138.861.209	78,66 %

<b>Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</b>	2.361.698.548	2.074.055.600	87,82 %
Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga	66.951.752	66.336.200	99,08 %
Kegiatan Penyusunan Rancanagn Peraturan Daerah tentang APBD	231.697.516	204.161.805	88,12 %
Kegiatan Penyusunan Rancanagn peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	186.471.366	170.207.870	91,28 %
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	166.897.528	138.749.481	83,13 %
Kegiatan Penyusunan Rancanagn peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	160.731.808	127.085.420	79,07 %
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	105.566.752	101.124.203	95,79 %
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	99.797.296	98.945.800	99,15 %
Kegiatan Penyusunan DPA SKPD	132.636.452	123.404.652	93,04 %
Kegiatan Penghapusan Barang-barang Inventaris	82.156.338	64.148.612	78,08 %
Kegiatan Penyusunan DPA Perubahan SKPD	109.432.428	81.482.275	74,46 %
Kegiatan Penunjang Sistim Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	391.791.488	337.715.518	86,20 %
Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Gaji PNSD	110.473.416	104.731.344	94,80 %

Kegiatan Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah	62.402.612	48.522.501	77,76 %
Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	378.978.360	361.011.569	95,26 %
Kegiatan Verifikasi Rencana Kebutuhan Barang ( RKB) dan Pemeliharaan Barang	75.713.436	46.428.710	61,32 %
<b>Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota</b>	586.245.148	465.974.739	79,48 %
Kegiatan Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan TA 2017	57.205.764	31.474.635	55,02 %
Kegiatan Asistensi Penataan Keuangan Daerah	137.367.688	126.221.522	91,89 %
Kegiatan pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial	68.467.660	64.175.324	93,73 %
Kegiatan Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD TA 2018	127.239.028	69.848.860	54,90 %
Kegiatan Analisa Standar Belanja Kabupaten Pesisir Selatan	195.965.008	174.254.396	88,92 %
<b>Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari</b>	244.356.734	223.705.432	91,55 %
Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Nagari	49.043.232	41.652.586	84,93 %
Kegiatan Monitoring dan Dana Transfer ke Nagari	100.938.446	91.244.960	90,40 %
Kegiatan TOT Aplikasi SIMDA DEsa ( Nagari)	94.375.056.	90.807.886	96,22 %

### **1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Adapun beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Layanan pemerintahan terutama dalam pemberian pelayanan public yang lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu
2. Belum tertatanya manajemen Aset Daerah
3. Belum Optimalnya Manajemen Data dan Informasi dalam seluruh proses perencanaan, peanggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan
4. Kurangnya koordinasi kerja sama kemitraan antar perangkat Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kemajuan Desa dan Kecamatan
5. Belum Optimalnya Kerja sama dan kemitraan pemerintah Daerah dan swasta dalam Pembangunan Daerah.

### **1.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD merupakan kerangka pendahuluan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang berhasil dihimpun dari masyarakat, stakeholders dan pemerintah sendiri. Rancangan awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap Perangkat Daerah untuk tahun



yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyiapkan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun direncanakan dan tahun yang akan datang. Berdasarkan rancangan awal Badan pengelola Keuangan Daerah serta berdasarkan hasil analisis kebutuhan diketahui bahwa kegiatan pada tahun 2017 sesuai dengan evaluasi renja.

### **1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Renja disusun melalui 2 tahapan, yaitu proses inventarisir indikator Renja Perangkat Daerah, berupa sub-sub kegiatan yang bersifat *top down* berasal dari himpunan kebutuhan program kegiatan dan *bottom up* melalui musrenbang. Selanjutnya berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi kegiatan yang da dengan melihat isu strategis, tantangan dan hambatan. Untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut diakomodasi dalam Urusan Wajib badan pengelola Keuangan Daerah.

### **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga dari periode RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021, oleh sebab itu arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, disusun berpedoman pada Renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 dan RPJMN Tahun 2015-2019 serta RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2021. Tujuannya agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan pengelola Keuangan Daerah dapat menjabarkan dan mensinkronkan kebijakan yang telah digariskan secara regional dan nasional.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam KMK No. 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 pada halaman 12 alinea ke 3 disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dalam periode 2010-2014 dilaksanakan penyempurnaan standard basis akuntansi dari basis *cash toward accrual* (CTA) menjadi berbasis accrual secara penuh sehingga mulai 1 Januari 2015 akuntansi berbasis akrual dapat dilaksanakan.

Sejalan dengan Instruksi tersebut maka BPKD Kabupaten Pesisir Selatan juga melaksanakan sistem akuntansi akrual dalam menjalankan manajemen pengelolaan keuangan aset daerah di Kabupaten Pesisir Selatan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi kementerian Keuangan serta mendukung tercapainya kebijakan level Nasional, Kementerian keuangan



menetapkan 7 ( Tujuh) tujuan dan telah dilengkapi dengan 16 ( enam belas ) sasaran Strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kementrian Keuangan dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (outcame) dari satu atau beberapa program.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan dan sasaran pembangunan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merujuk pada arah dan kebijakan RKPD Tahun 2019 yang berpedoman pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Sejalan dengan kebijakan RPJMD pada misi ke-4 tersebut di atas, Tujuan dan sasaran pembangunan pada Badan pengelola Keuangan Daerah tahun 2019 diuraikan pada tabel sebagai berikut :

<b>Misi Melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan Aparatur yang Bersih dan Responsif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat</b>			
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target Kinerja Sasaran</b>
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Tertib	1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Baik	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD	Bulan Desember
		Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %
	2. Meningkatkan Kualitas Manajemen dan pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Perangkat Daerah Taat pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %



### **3.3. Program dan Kegiatan Tahun 2019**

Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019, merupakan program dan kegiatan yang dapat menunjang pencapaian indikator sasaran tahun ke-3 RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. Program dan Kegiatan yang disusun disesuaikan dengan potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Pesisir Selatan. Didalam tahapan penyusunan program dan kegiatan tersebut dijelaskan bahwa jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya maka akan dilakukan perbaikan terhadap program dan kegiatan yang tersaji dalam RKPD Tahun 2019.

Adapun program dan kegiatan yang dirancang Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk dioperasionalkan pada tahun 2019 dengan uraian table 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.3 Program dan Kegiatan tahun 2019

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	
	<b>BELANJA RUTIN</b>		
	PROG.PELAYANAN ADMINISTRASI PERKATORAN	1,216,709,656.00	
	PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1,561,572,575.00	
	PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	50,000,000.00	
	<b>URUSAN WAJIB</b>		
	<b>PROG. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	115,491,491.00	
03 06	04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	115,491,491.00
	<b>PROG. PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH</b>	79,998,487.00	
03 20	33	Penanganan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara / Daerah	79,998,487.00
	<b>PROG. PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI</b>	25,000,000.00	
03 05	01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan	25,000,000.00
	<b>PROG. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>3,821,227,836.00</b>	
03 17	06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	149,999,872.00
03 17	07	Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	149,979,910.00
03 17	08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	149,079,909.00
03 17	09	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD	149,974,831.00
03 17	10	pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	92,199,161.00
03 17	102	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Periodik dan Pembinaan Laporan Keuangan SKPD	316,000,000.00
03 17	103	Penunjang Bendera Umum Daerah	843,991,717.00
03 17	104	Pengelola Dana Transfer	107,465,715.00
03 17	11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	129,998,436.00
03 17	20	Penyusunan DPA SKPD	74,999,880.00
03 17	22	Penyusunan Lkaoran Barang Milik Daerah	167,049,396.00
03 17	27	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan	82,000,000.00
03 17	29	Penyusunan DPA Perubahan SKPD	74,997,337.00
03 17	36	Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah	42,532,337.00
03 17	47	Penunjang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	286,066,531.00
03 17	82	Penghapusan Barang-Barang Inventais	40,000,000.00
03 17	90	Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD	107,098,294.00
03 17	91	Sertifikat Tanah Pemda	379,795,240.00
17	92	Inventaris Barang	380,000,000.00

	17	99	Pedoman Penyusunan RKA	79,999,270.00
			<b>PROG. PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA</b>	<b>29,999,956.00</b>
				29,999,956.00
03	18	06	Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017	
03	18	10	Rekonsiliasi Dana Transfer ke Daerah	
03	18	11	Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial	
03	18	11	Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018	
03	18	12	Analisa Standar Belanja Kabupaten Pesisir Selatan	
03	18	13	Rekonsiliasi Dana Transfer ke Daerah	

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Badan pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan**

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan ( Output)	
1	2	3	5
03 01	<b>PROG.PELAYANAN ADMINISTRASI PERKATORAN</b>	Terpenuhinya Layanan ADM Perkantoran	
	<b>PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	Terlaksananya Peningkatan saran dan Prasarana	
	<b>PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	Meningkatnya SDM ASN	
	<b>PROG. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran	
03 06 04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	7 Laporan Sesuai SAP	100%
	<b>PROG. PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH</b>	Penyelesaian Kasus Ganti Kerugian Negara Daerah	
03 20 33	Penanganan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara / Daerah	Penyelesaian Kasur Ganti Rugi sesuai LHP BPK 2013,2014,2015,2016,2017,2018	100%
	<b>PROG. PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI</b>		100%
03 05 01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan		
	<b>PROG. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>		
03 17 06	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersusunnya buku Peraturan Daerah Tentang APBD	100 Buku
03 17 07	Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Dokumen Rencana Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD	100 Buku
03 17 08	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	100 Buku
03 17 09	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	Tersusunnya buku peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	100 Buku
03 17 10	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100 Buku
03 17 102	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Periodik dan Pembinaan Laporan Keuangan SKPD	PPK SKPD mampu menyusun sendiri laporan keuangannya sesuai SAP	45 SKPD
03 17 103	Penunjang Bendera Umum Daerah		12 bulan
03 17 104	Pengelola Dana Transfer		12 bulan
03 17 11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	100 Buku
03 17 20	Penyusunan DPA SKPD	Tersusunnya DPA OPD	540 Buku
03 17 22	Penyusunan Lkaoran Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	1058 Buku
03 17 27	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan		100%
03 17 29	Penyusunan DPA Perubahan SKPD	Tersusunnya Buku DPA Peubahan OPD	540 Buku
03 17 36	Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah		100%
03 17 39	Pengelolaan Penatausahaan Gaji PNSD		100%
03 17 41	Bimbingan Teknis Belanja Non Tunai		100%

03	17	42	Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah		100%
03	17	47	Penunjang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersediannya Penunjang SIPKD	12 Bln
03	17	82	Penghapusan Barang-Barang Inventais		100%
03	17	90	Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD	Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang BMD	Perda 1 Perbu
03	17	91	Sertifikat Tanah Pemda	tersedianya sertifikat tanah Milik Pemerintahan Daerah	30 Sertifikat
	17	92	Inventaris Barang	Tersedianya data Barang Milik Daerah yang benar dan Akurat	45 OPD
	17	99	Pedoman Penyusunan RKA	Tersusunnya buku standar biaya (pedoman penyusunan RKA) dan terselenggaranya sosialisasi	100%
			<b>PROG. PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA</b>		
03	18	06	Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017	Tersusunnya Dokumen Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019	75 Buku
03	18	10	Rekonsiliasi Dana Transfer ke Daerah		100%
03	18	11	Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial		100%
03	18	11	Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018		100%
03	18	12	Analisa Standar Belanja Kabupaten Pesisir Selatan		100%
03	18	13	Rekonsiliasi Dana Transfer ke Daerah		100%

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 disusun melalui proses tahapan yang cukup panjang mulai dari musrenbang nagari, musrenbang kecamatan sampai musrenbang tingkat Kabupaten Kabupaten dalam rangka memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Renja merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 di lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2019 yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahun 2019.

Semoga Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

**Painan, 2 JULI 2018**  
**KEPALA BADAN PENGELOLA**  
**KEUANGAN DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**SUHANDRI, SE.MM**  
**NIP. 19700608 200212 1 003**

**LAMPIRAN**

Usulan Rencana Kerja Tahun 2019  
Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Kabupaten Pesisir Selatan

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019  
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH**

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019 ( Tahun Rencana )				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikauf	Sumber Dana			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03 01	<b>PROG.PELAYANAN ADMINISTRASI PERKATORAN</b>								
03 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Terbawarnya tagihan jasa telepon, air dan listrik	BPKD	12 bulan	204,810,000	APBD		12 bulan	210,000,000
03 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya Pelayanan ADM Pengelola Keuangan Daerah	BPKD	100%	306,300,000	APBD		100%	310,000,000
03 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya kebersihan Kantor	BPKD	12 bulan	180,250,000	APBD		12 bulan	190,000,000
03 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terperuhnya Kebutuhan Penyelenggaraan Adm Perkantoran	BPKD	100%	85,270,948	APBD		100%	90,000,000
03 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terperuhnya Kebutuhan Penyelenggaraan Adm Perkantoran	BPKD	100%	40,247,960	APBD		100%	50,000,000
03 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terperuhnya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BPKD	100%	23,940,000	APBD		100%	25,000,000
03 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang2an	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur	BPKD	12 bulan	13,900,000	APBD		12 bulan	15,000,000
03 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terperuhnya makan dan minum harian rapat dan tamu	BPKD	100%	59,950,000	APBD		100%	65,000,000
03 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	BPKD	100%	239,928,747	APBD		100%	250,000,000
03 01 19	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi rapat-rapat dalam daerah	BPKD	100%	62,112,000	APBD		100%	80,000,000
03 02	<b>PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>								
03 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terperuhnya kendaraan Dinas/Operasional	BPKD	100%	1,063,429,153	APBD		100%	1,200,000,000

03 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terperluhinya Perlengkapan Kantor	BPKD	100%	60,100,000	APBD	100%	70,000,000.00
03 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		BPKD	100%	136,100,000	APBD	100%	150,000,000.00
03 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terperluharnya Gedung Kantor 1 Tahun	BPKD	100%	85,000,000	APBD	100%	90,000,000.00
03 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terperluharnya Kendaraan Dinas/Operasional	BPKD	100%	181,943,422	APBD	100%	182,000,000.00
03 02 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	terperluharnya perlengkapan gedung kantor	BPKD	100%	35,000,000	APBD	100%	50,000,000.00
03 05 01	<b>PROG. PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>							
	Pendidikan Pelatihan Formal	Meningkatnya Keterampilan Aparatur	BPKD	100%	50,000,000	APBD	100%	70,000,000.00
03 06 04	<b>PROG. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>							
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	7 Laporan Sesuai SAP	BPKD	100%	115,491,491	APBD	100%	130,000,000.00
03 20 33	<b>PROG. PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBELAKAN KDH</b>							
	Pemangan Kasus dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara / Daerah	Penyelesaian Kasur Ganti Rugi sesuai LHP BPK 2013,2014,2015,2016,2017,2018	BPKD	100%	79,998,487	APBD	100%	90,000,000.00
03 05 01	<b>PROG. PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI</b>							
	Penyebutan Informasi Pembangunan		BPKD	100%	25,000,000	APBD	100%	40,000,000.00
03 17 06	<b>PROG. PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>							
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	Tersusunnya buku Peraturan Daerah Tentang APBD	BPKD	100 Buku	149,999,872	APBD	100 Buku	160,000,000.00
03 17 07		Penyusunan Rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	BPKD	100 Buku	149,979,910	APBD	100 Buku	160,000,000.00
03 17 08		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	BPKD	100 Buku	149,079,909	APBD	100 Buku	160,000,000.00
03 17 09		Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	BPKD	100 Buku	149,974,831	APBD	100 Buku	160,000,000.00
03 17 10		Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKD	100 Buku	92,199,161	APBD	100 Buku	100,000,000.00
03 17 102	Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Periodik dan Pembinaan Laporan Keuangan SKPD	PPK SKPD mampu menyusun sendiri laporan keuangannya sesuai SAP	BPKD	45 SKPD	316,000,000	APBD	45 SKPD	330,000,000.00

03	17	103	Penunjang Bendara Umum Daerah		BPKD	12 bulan	843,991,717	APBD	12 bulan	900,000,000.00
03	17	104	Pengelola Dana Transfer		BPKD	12 bulan	107,465,715	APBD	12 bulan	110,000,000.00
03	17	11	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	BPKD	100 Buku	129,998,436	APBD	100 Buku	150,000,000.00
03	17	20	Penyusunan DPA SKPD	Tersusunnya DPA OPD	BPKD	540 Buku	74,999,880	APBD	540 Buku	90,000,000.00
03	17	22	Penyusunan Lkaoran Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	BPKD	1058 Buku	167,049,396	APBD	1058 Buku	180,000,000.00
03	17	27	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan	Tersusunnya Laporan RK BMD dan RKP BMD	BPKD	100%	82,000,000	APBD	100%	90,000,000.00
03	17	29	Penyusunan DPA Perubahan SKPD	Tersusunnya Buku DPA Perubahan OPD	BPKD	540 Buku	74,997,337	APBD	540 Buku	90,000,000.00
03	17	36	Pengelolaan dan Pematausahaan Kas Daerah		BPKD	100%	42,532,337	APBD	100%	60,000,000.00
03	17	39	Pengelolaan nPenatausahaan Gaji PNSD		BPKD	100%	-	APBD	100%	
03	17	41	Bim bingran Teknis Belanja Non Tunai		BPKD	100%	-	APBD	100%	
03	17	42	Bim bingran Teknis Pematausahaan Barang Milik Daerah		BPKD	100%	-	APBD	100%	
03	17	47	Penunjang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersediannya Penunjang SIPKD	BPKD	12 Bln	286,066,531	APBD	12 Bln	30,000,000.00
03	17	82	Penghapusan Barang-Barang Inventaris		BPKD	100%	40,000,000	APBD	100%	50,000,000.00
03	17	90	Penyusunan Regulasi Pengelolaan BMD	Tersusunnya Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang BMD	BPKD	Perda 1 Perbu	107,098,294	APBD	1 Perda 1 Perbub	120,000,000.00
03	17	91	Sertifikat Tanah Pemda	tersediaan sertifikat tanah Milik Pemerintahan Daerah	BPKD	30 Sertifikat	379,795,240	APBD	30 Sertifikat	400,000,000.00
17	92		Inventaris Barang	Tersediannya data Barang Milik Daerah yang benar dan Akurat	BPKD	45 OPD	380,000,000	APBD	45 OPD	420,000,000.00
17	99		Pedoman Penyusunan RKA	Tersusunnya buku standar biaya (pedoman penyusunan RKA) dan terselenggaranya sosialisasi	BPKD	100%	79,999,270	APBD	100%	100,000,000.00
<b>PROG. PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAN KEUANGAN KABUPATEN/ KOTA</b>										
03	18	06	Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017	Tersusunnya Dokumen Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019	BPKD	75 Buku	29,999,956	APBD	75 Buku	35,000,000.00
03	18	10	Rekonsiliasi Dana Transfer ke Daerah		BPKD	100%		APBD	100%	
03	18	11	Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial		BPKD	100%		APBD	100%	
03	18	11	Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018		BPKD	100%		APBD	100%	

03 18 12	Analisa Standar Belanja Kabupaten Pesisir Selatan		BPKD	100%		APBD	100%
03 18 13	Rekonsiliasi Dana Transfer ke Daerah		BPKD	100%		APBD	100%
	<b>PROG. PEMBINAAN DAN FASILITAS PENGELOLAN KEUANGAN DESA / NAGARI</b>						
03 19 09	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Nagari		BPKD	100%		APBD	100%
03 19 10	Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer ke Nagari		BPKD	100%		APBD	100%
03 19 12	TOT Aplikasi SIMDADESA [ Nagari ]		BPKD	100%			100%

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN  
CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2018  
KABUPATEN PESIRIS SELATAN**

Kode Rek	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan Output	Target Kinerja capaian Program ( Renstra Perangkat daerah) Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016			Target Program dan Kegiatan(Renja Perangkat daerah Tahun 2018	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
				Realisasi target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2016	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
03 01	<b>PROG.PELAYANAN ADMINISTRASI PERKATORAN</b>								
03 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Terbayarnya tagihan jasa telepon, air dan listrik	100%	136,133,613	84.66%	100%	73%	73%	
03 01 07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Meningkatnya Pelayanan ADM Pengelola Keuangan Daerah	100%	207,757,646	96.72%	100%	78.11%	78.11%	
03 01 08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Meningkatnya kebersihan Kantor	100%	138,356,920	99.54%	100%	72.40%	72.40%	
03 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Penyelenggaraan Adm Perkantoran	100%	63,221,509	94.61%	100%	80.00%	80.00%	
03 01 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Penyelenggaraan Adm Perkantoran	76%	44,335,300	98.27%	100%	75.80%	75.80%	
03 01 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	12,125,500	97.97%	100%	90%	90%	
03 01 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Pengetahuan Aparatur	100%	8,080,000	46.38%	100%	88%	88%	
03 01 17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya makan dan minum harian rapat dan tamu	100%	70,245,850	80.62%	100%	83.17%	83.17%	
03 01 18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	100%	281,525,317	96.69%	100%	80.90%	80.90%	
03 01 20	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan konsultasi rapat-rapat dalam daerah	100%	76,126,900	99.28%	100%	98%	98%	
03 01 22	Penyediaan Operasional Perencanaan dan Laporan	Terlaksananya Dokumen Anggaran dan Pelaporan Pertanggungjawaban OPD	100%	73,980,750	90.98%	100%	80%	80%	
	<b>PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>								
03 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Terpenuhinya Kenderaan Dinas/Operasional	15 mobil kend. Rd 4 dan 2 Unit Kend. Rd 2	435,166,630	52.51%	3 Unit	100%	100%	
03 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Terpenuhinya Perlengkapan Kantor	3 Unit Kunci elektr. 1 unit Absen Elektr.	104,004,500	92.58%	100%	86.64%	86.64%	
03 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpilihannya Gedung Kantor 1 Tahun	100%	238,634,500	86.65%	100%	61.43%	61.43%	
03 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional	Terpilihannya Kenderaan Dinas/Operasional	100%	121,046,709	72.92%	100%	91.77%	91.77%	
03 02 26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	terpilihannya perlengkapan gedung kantor	100%	27,735,920	98.70%	100%	91.77%	91.77%	



03 17 28	Penyusunan DPA Perubahan SKPD	Termalnya Pengaturan Anggaran OPD	516 buku	516 buku	516 buku	103,820,300	94,63%	528 buku	14%	14%
03 17 29	Pemajang Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terkaitnya Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Perangkat SIPKD	100%	100%	100%	671,547,602	97,13%	100%	73,89%	73,89%
03 17 41	Pengelolaan dan Penatausahaan gaji PNSD	Terkaitnya pengelolaan Penatausahaan Gaji ASN	100%	100%	100%	71,381,575	90,98%	100%	75%	75%
03 17 42	Pengelolaan dan Penatausahaan Kas Daerah	Terwujudnya Pengelolaan dan Penatausahaan kas Daerah	100%	100%	100%			100%	75%	75%
03 17 75	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pemeliharaan		0	0	0	-	0	100%	90%	90%
03 17 77	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		0	0	0	-	0	600 buku	100%	100%
03 17 79	Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah		0	0	0	-	0	100%	0	0
03 17 80	Revisi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan							90 Buku	50%	50%
03 17 83	Penyusunan Standar Biaya							100%	61,78%	61,78%
03 17 84	Sosialisasi Performa Penyusunan APBD		0	0	0	-	0	100%	50,00%	50,00%
03 17 86	Bimbingan Teknis Belanja Non Tunai							100%	0	0
03 17 43	Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	Tersedianya buku Laporan Barang Milik Daerah per OPD dan Unit Kerja	558 buku	558 buku		465,613,200	98,72%	0	0	0
03 17 57	Verifikasi Rencana Kebutuhan Barang RKB dan Pemeliharaan Barang	Terverifikasinya rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan barang	100%	100%						
03 18 06	Analisa APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017	Tersusunya Dokumen Analisa APBD Kabupaten Pesisir	1 Dok	1 Dok		37,591,500	65,54%	100%	0	0
03 18 08	Asistensi Penata Keuangan Daerah	Tarainya Penata Keuangan Daerah	100%	100%		31,524,800	77,73%			
03 18 09	Pengelolaan Dana Hibah dan Bantuan Sosial	Tertibnya Pengelolaan Dana dan Bansos	100%	100%		62,674,225	93,85%	100%	70%	70%
03 18 11	Penyusunan dan Sosialisasi Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018	Tersedianya buku pedoman penyusunan APBD	70%	70%		95,899,400	83,38%			
03 18 12	Analisa Standar Belanja Kabupaten Pesisir Selatan	Ternumanya standar belanja untuk pengelolaan keuangan di Kab. Pesisir	10 Buku	10 Buku						
03 18 13	Rekonsiliasi Dana Transfer ke Daerah		0	0		-	0	100%	88,12%	88,12%
03 19 09	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Nagari	Tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan Nagari	100%	100%		54,482,306	76,04%	182 Nagari	75%	75%
03 19 10	Monitoring dan Evaluasi Dana Transfer ke Nagari	Terevaluasinya dana transfer ke Nagari	100%	100%		108,099,675	85,67%	100%	98%	98%

03	19	12	TOT Aplikasi SIMDADBSA (Nigari)	Terselenggaranya TOT Aplikasi Siskeudes (Nigari)	100%	100%	124,758,750	61.53%	100%	58%	58%
----	----	----	---------------------------------	--	------	------	-------------	--------	------	-----	-----